

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA UMKM PUPUK MART DAN KESESUAIANNYA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Tulus Pujo Nugroho

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Indonesia

Article History

Received : October 23rd 2025

Revised : November 23rd 2025

Accepted : December 23rd 2025

Available Online: December 30th 2025

Corresponding author*:

tuluspujogroho@gmail.com

Cite This Article: Tulus Pujo Nugroho. (2025). EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA UMKM PUPUK MART DAN KESESUAIANNYA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(3), 123–133. Retrieved from <https://journal.admi.or.id/index.php/JEKMA/article/view/2080>

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jekma.v4i3.2080>

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi sistem akuntansi pengeluaran kas pada UMKM ritel *Pupuk Mart* dan menilai kesesuaiannya dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara (pemilik, kasir, admin/akuntansi), observasi alur kerja, dan telaah dokumen (BKK, PO, faktur, dan BAST/GR). Analisis dilakukan menggunakan flowchart proses, matriks RACI (pemisahan tugas), dan matriks risiko–pengendalian. Hasil menunjukkan sistem eksisting (*AS-IS*) belum selaras dengan SPI: terjadi rangkap fungsi (kasir membeli sekaligus membayar), dokumen tidak bernomor urut dan tanpa cap “LUNAS”, ketiadaan *three-way match* (PO–GR/BAST–Invoice) sebelum pembayaran, serta rekonsiliasi bank yang tidak rutin. Rancangan perbaikan (*TO-BE*) meliputi penerapan kas kecil metode *imprest*, *three-way match* wajib, limit otorisasi berjenjang dengan *maker–checker*, penomoran urut seluruh dokumen, arsip berindeks, dan rekonsiliasi bank bulanan. Implementasi bertahap diharapkan meningkatkan ketepatan pembayaran, keandalan pelaporan, dan jejak audit, sekaligus memitigasi risiko kecurangan dengan biaya implementasi yang rendah dan sesuai skala UMKM.

Kata Kunci: pengeluaran kas; UMKM; sistem informasi akuntansi; pengendalian internal; *three-way match*; *imprest*.

1. PENDAHULUAN

Sebagai tulang punggung perekonomian, UMKM menghadapi tekanan operasional yang tinggi pada siklus pembelian–pembayaran, terutama ketika frekuensi pengeluaran kas meningkat untuk belanja persediaan dan biaya harian. Pada konteks ritel seperti “Pupuk Mart”, keputusan pembelian sering kali bersifat cepat dan berbasis kebutuhan stok, sehingga risiko salah bayar, duplikasi transaksi, atau penyimpangan prosedur meningkat apabila Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas tidak dirancang secara memadai (OECD, 2017; World Bank, 2020). Oleh sebab itu, tata kelola proses pengeluaran kas yang efektif menjadi prasyarat dasar untuk menjaga likuiditas sekaligus akurasi pelaporan.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, kerangka Sistem Pengendalian Internal (SPI) menyediakan fondasi yang sistematis untuk memastikan keandalan pelaporan, efektivitas operasi, dan kepatuhan (COSO, 2013). Dalam praktik, lima komponen SPI—lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan—harus terjalin dalam setiap titik kendali pengeluaran kas. Transisi dari pemahaman konsep ke implementasi menuntut penerjemahan prinsip SPI ke kebijakan dan prosedur yang konkret serta proporsional dengan skala UMKM (The Institute of Internal Auditors [IIA], 2017).

Selanjutnya, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berperan sebagai enabler untuk mengintegrasikan kebijakan, dokumen, dan catatan agar aliran data keuangan tertib dan dapat diaudit. Di tingkat UMKM, SIA yang sederhana—misalnya berbasis spreadsheet terkontrol—dapat mendukung pencatatan dan rekonsiliasi jika dirancang dengan penomoran dokumen, otorisasi berjenjang, serta jejak audit yang memadai (Romney & Steinbart, 2018; Hall, 2016). Transisi dari kebijakan ke implementasi teknis menuntut pemilihan struktur dokumen yang benar dan konsisten di sepanjang siklus pembelian–pembayaran (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019).

Untuk mengurangi risiko salah bayar, mekanisme *three-way match* (3WM)—mencocokkan PR/PO, bukti penerimaan (GR/BAST), dan invoice sebelum pembayaran—merupakan praktik baku yang efektif, bahkan pada skala usaha kecil (Kieso et al., 2019). Implementasi 3WM memperkuat *gate* verifikasi, memastikan hanya kewajiban yang sah dan barang yang benar-benar diterima yang dibayar. Peralihan dari pembayaran tunai ke transfer bank juga memperkaya *audit trail* sehingga penelusuran transaksi menjadi lebih andal (Mulyadi, 2016; Krismiaji, 2015).

Di sisi lain, pemisahan tugas (*segregation of duties*) dan model RACI (Responsible–Accountable–Consulted–Informed) membantu memitigasi konflik kepentingan ketika sumber daya manusia terbatas—kondisi yang lazim pada UMKM (IIA, 2017; Moeller, 2016). Transisi dari struktur peran informal ke RACI yang eksplisit menutup celah rangkap fungsi antara otorisasi, penguasaan aset (*custody*), dan pencatatan. Dengan demikian, risiko kesalahan dan kecurangan dapat ditekan tanpa membebani organisasi dengan birokrasi berlebihan.

Literatur audit dan pengendalian menunjukkan bahwa kelemahan internal control berkorelasi dengan peningkatan salah saji dan inefisiensi proses (Doyle, Ge, & McVay, 2007; Messier, Glover, & Prawitt, 2017). Bagi UMKM ritel, risiko fraud yang dominan justru sering muncul dari skema kas kecil yang longgar, bukti tidak lengkap, atau otorisasi yang tidak terdokumentasi (ACFE, 2022). Transisi dari praktik ad-hoc menuju kebijakan *imprest* kas kecil dengan dokumentasi bernomor urut dan *maker–checker* merupakan langkah minimal yang berdampak langsung pada mitigasi risiko (Mulyadi, 2016).

Dalam perspektif desain proses, keberhasilan pengendalian tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh arsitektur dokumen dan alur kerja yang memadai—mulai PR, PO, GR/BAST, invoice, hingga voucher/BKK—yang saling terhubung dan mudah ditelusuri (Romney & Steinbart, 2018; Hall, 2016). Transisi dari kebijakan ke eksekusi perlu diiringi *cut-off* periodik, rekonsiliasi bank bulanan, dan pengarsipan berindeks untuk memastikan integritas data serta kesiapan audit (Gelinis, Dull, & Wheeler, 2018; IFAC, 2016).

Berangkat dari celah yang teridentifikasi di banyak UMKM ritel, penelitian ini bertujuan memetakan proses *AS-IS* pengeluaran kas pada “Pupuk Mart”, mengevaluasi kesesuaiannya dengan SPI, serta menawarkan rancangan *TO-BE* yang realistis, berbiaya rendah, dan replikabel. Transisi dari temuan ke rekomendasi diformulasikan melalui bagan alir, matriks risiko–pengendalian, dan RACI, sehingga kontribusi riset tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional bagi pelaku UMKM dan pembuat kebijakan (COSO, 2013; OECD, 2017; World Bank, 2020).

2. STUDI PUSTAKA

Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan bagian integral dari sistem informasi akuntansi (SIA) yang bertujuan mencatat dan mengendalikan seluruh arus kas keluar, baik melalui kas kecil maupun rekening bank. Menurut Mulyadi (2016), sistem ini melibatkan rangkaian dokumen, catatan, dan prosedur yang dirancang untuk memastikan setiap pengeluaran kas dilakukan secara sah dan sesuai otorisasi. Dalam praktik UMKM, pengeluaran kas sering mencakup pembayaran pembelian barang dagang, biaya operasional, dan pengeluaran rutin lainnya. Namun, banyak UMKM masih bergantung pada pencatatan manual menggunakan lembar kerja sederhana tanpa sistem penomoran dokumen yang teratur (Krismiaji, 2015). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam pelaporan keuangan.

Untuk menjaga keandalan sistem akuntansi, penerapan **Sistem Pengendalian Internal (SPI)** menjadi krusial. Kerangka kerja yang banyak digunakan adalah *Internal Control–Integrated Framework* dari COSO (2013), yang mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hall (2016) menjelaskan bahwa pengendalian internal tidak hanya berfungsi untuk mencegah kecurangan, tetapi juga memastikan efisiensi operasi dan keakuratan pelaporan keuangan. Dalam konteks UMKM, SPI sering kali belum diterapkan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman teknis (Doyle, Ge, & McVay, 2007).

Salah satu praktik pengendalian yang penting dalam siklus pengeluaran kas adalah penerapan **three-way match (3WM)**, yaitu pencocokan antara *purchase order* (PO), bukti penerimaan barang (BAST/GR), dan faktur pemasok sebelum pembayaran dilakukan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019). Mekanisme ini berfungsi sebagai verifikasi berlapis agar pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi yang benar-benar terjadi dan telah sesuai dengan pesanan. Romney dan Steinbart (2018) menegaskan bahwa 3WM

merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pembelian terkomputerisasi yang mencegah salah bayar dan memperkuat jejak audit.

Selain itu, pengelolaan kas kecil pada UMKM sering kali menjadi sumber penyimpangan apabila tidak diatur secara ketat. Menurut Aini, Mulyono, dan Rahmawati (2024), penerapan sistem dana tetap (*imprest system*) terbukti lebih efektif dibanding sistem fluktuatif karena menuntut disiplin dalam penyusunan bukti dan memudahkan rekonsiliasi. Sistem *imprest* menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus disertai bukti sah, dan pengisian kembali dilakukan sebesar total bukti yang telah disetujui (Mulyadi, 2016). Dengan cara ini, potensi manipulasi saldo kas kecil dapat ditekan, serta pelaporan menjadi lebih transparan.

Dalam hal pembagian peran, prinsip **pemisahan tugas** (*segregation of duties*) menjadi dasar penting dalam pengendalian internal. IIA (2017) merekomendasikan pembagian fungsi antara otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan kas untuk mencegah konflik kepentingan. Model RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) dapat digunakan sebagai pendekatan minimalis bagi UMKM untuk menghindari perangkapan fungsi. Moeller (2016) menambahkan bahwa bahkan dalam organisasi kecil, kombinasi mekanisme *maker-checker* dapat memberikan lapisan pengendalian yang efektif dan terukur tanpa membebani struktur organisasi.

Literatur audit juga menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal memiliki korelasi positif dengan meningkatnya tingkat salah saji laporan keuangan (Messier, Glover, & Prawitt, 2017). Berdasarkan laporan ACFE (2022), *asset misappropriation* atau penyalahgunaan aset—yang termasuk kecurangan pada kas—merupakan jenis fraud yang paling sering terjadi, mencapai 86% dari total kasus yang dilaporkan. Oleh karena itu, aktivitas pengeluaran kas perlu disertai pengendalian preventif (seperti batas otorisasi, dokumen bernomor urut, dan cap “LUNAS”) serta pengendalian detektif (seperti rekonsiliasi bank bulanan) untuk mendeteksi potensi anomali lebih awal.

Selain aspek pengendalian, digitalisasi sederhana pada UMKM dapat meningkatkan efisiensi proses pengeluaran kas. Navalina (2021) menekankan bahwa penggunaan spreadsheet terproteksi, penomoran otomatis dokumen, serta penyimpanan digital (scan atau foto) membantu memperkuat jejak audit dan mempermudah *tracing* saat proses pemeriksaan. Gelinis, Dull, dan Wheeler (2018) menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam sistem akuntansi berperan penting dalam mempercepat siklus pelaporan dan meningkatkan akurasi pencatatan, bahkan pada skala usaha kecil.

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya SPI dalam siklus pengeluaran kas, sebagian besar fokusnya masih parsial, terbatas pada penerapan satu atau dua elemen kontrol seperti kas kecil atau rekonsiliasi bank. Penelitian yang secara komprehensif mengkaji kesesuaian seluruh proses pengeluaran kas UMKM terhadap kerangka SPI—mulai dari dokumentasi, pemisahan fungsi, otorisasi berjenjang, hingga verifikasi *three-way match*—masih terbatas (Syah, 2024; Syafira, Rizqi, & Rumiasih, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memetakan proses *AS-IS* pengeluaran kas di “Pupuk Mart”, menilai tingkat kesesuaian terhadap prinsip SPI, serta menyusun rancangan *TO-BE* yang realistis dan replikabel untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pengendalian kas di UMKM ritel.

Tabel 1. Penelitian sebelumnya

No	Peneliti & Tahun	Objek/Sektor	Metode	Fokus	Temuan Utama	Relevansi
1	Syah (2024)	UMKM kuliner (Mealsmound.Id)	Deskriptif kualitatif	Evaluasi sistem pengeluaran kas	Pencatatan manual, belum ada BKK & rekonsiliasi; usulan format kas masuk/keluar sederhana	Memetakan masalah khas UMKM & kebutuhan dokumentasi dasar.
2	Syafira, Rizqi, & Rumiasih (2024)	CV Migaspro (jasa)	Studi kasus	Implementasi 3WM	3WM menurunkan salah bayar/ketidaksesuaian; kualitas AIS membaik meski proses masih manual	Bukti empiris efektivitas 3WM untuk kontrol pembayaran. (Jurnal Minartis)

No	Peneliti & Tahun	Objek/Sektor	Metode	Fokus	Temuan Utama	Relevansi
3	Amalia & Siahaan (2024)	Lembaga pendidikan	Deskriptif	Aplikasi AIS kas masuk/keluar & kontrol	Kelemahan pemisahan tugas; rekomendasi audit internal & sistem berbasis komputer	Menegaskan pentingnya pemisahan tugas & audit berkala.
4	Chusnia dkk. (2025)	Ritel UMKM (Sinar Grosir)	Studi kasus	Penerimaan kas & SPI	Kasir terkomputerisasi, nomor urut, rekonsiliasi harian; perlu perkuat pemisahan tugas & rekonsiliasi	Contoh digitalisasi ringan & nomor urut memperkuat SPI.
5	Aini dkk. (2024)	UMKM manufaktur	PKM/pendampingan	Kas kecil metode <i>imprest</i>	<i>Imprest</i> meningkatkan disiplin bukti & kemampuan staf; rekomendasi monitoring pasca-implementasi	Landasan memilih <i>imprest</i> untuk Pupuk Mart. (ResearchGate)
6	Dwiyanti & Sari (2023)	UMKM olahan makanan	Studi kasus	SPI atas kas, persediaan, pembelian	SPI cukup baik namun masih ada celah SDM & prosedur	Bukti perlunya SOP tertulis & pembagian kewenangan. (Ekonomis UNBARI)
7	Khairi (2024)	Jasa kreatif (production house)	Riset terapan	SOP & flowchart pengeluaran kas kecil	Menghasilkan SOP & flowchart BKK berbasis pengendalian internal untuk entitas kecil	Template SOP/flowchart dapat diadaptasi Pupuk Mart.
8	Navalina (2021)	Koperasi	Tinjauan literatur	TI untuk penerimaan & pengeluaran kas	Teknologi memperkuat akurasi, kecepatan, dan kepuasan layanan	Penguatan argumen digitalisasi bertahap. (Journal Social Sciences)
9	Tinangon (n.d.)	Instansi pemerintah	Evaluatif	SPI pengeluaran kas	Penekanan pentingnya sistematisasi prosedur & dokumentasi	Prinsip umum SPI pengeluaran kas lintas sektor. (Neliti)
10	HashMicro (2025)	— (artikel praktis)	Ulasan	Definisi & praktik 3WM	3WM = cocokkan PO, GR, Invoice; mencegah kesalahan pembayaran	Referensi praktis definisi 3WM. (HashMicro)
11	Kledo (2023)	— (artikel praktis)	Ulasan	3WM & manfaat	Tekankan akurasi & keandalan informasi pembelian	Penguat urgensi 3WM sebelum bayar. (Kledo)
12	Owner Journal (2024)	UMKM beragam	Artikel ilmiah	Pengelolaan kas UMKM	Perencanaan & kontrol kas yang lemah → risiko likuiditas & kecurangan	Konteks umum risiko kas UMKM. (Owner Polgan)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai rancangan, pelaksanaan, serta kelemahan pengendalian pada sistem akuntansi pengeluaran kas di UMKM “Pupuk Mart.” Pendekatan ini dipilih agar proses aktual dapat direkam secara kontekstual, kemudian dipetakan ke dalam model alir dan dievaluasi terhadap prinsip pemisahan tugas, otorisasi, dokumentasi, dan rekonsiliasi.

3.2 Lokasi, Objek, dan Konteks

Objek penelitian adalah UMKM ritel harian Pupuk Mart yang menjual sembako, ATK, dan makanan ringan. Struktur organisasi bersifat sederhana: Pemilik, Kasir, Admin/Accounting, dan Gudang/Receiving. Aktivitas pembelian dilakukan rutin mingguan serta insidental saat stok menipis. Pencatatan keuangan masih berbasis spreadsheet (Excel) tanpa sistem akuntansi terintegrasi.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

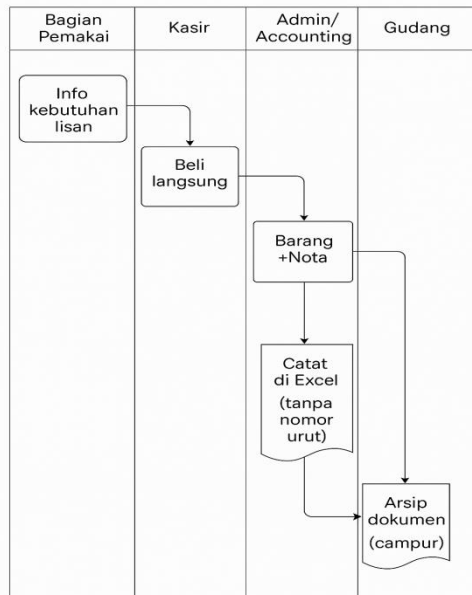
1. Wawancara semi-terstruktur dengan Pemilik, Kasir, dan Admin/Accounting untuk memetakan peran, alur, dan kebijakan yang berjalan.
2. Observasi langsung di titik proses pengeluaran kas: pengajuan kebutuhan, pembelian, pembayaran, penyerahan bukti, pencatatan, dan pengarsipan.
3. Telaah dokumen: bukti kas keluar (BKK), *purchase order* (PO) bila ada, nota/faktur pemasok, dan bukti penerimaan barang (BAST/GR).

3.3 Prosedur dan Narasi Proses Eksisting (AS-IS)

Hasil observasi menunjukkan alur kerja yang sederhana dan sangat bergantung pada komunikasi lisan. Proses dimulai ketika Bagian Pemakai menyampaikan kebutuhan barang secara lisan kepada Kasir tanpa formulir permintaan pembelian. Setelah menerima informasi, Kasir membeli langsung ke pemasok, menerima barang dan nota, lalu membayar tunai di tempat. Pada tahap ini, Kasir merangkap peran sebagai pembeli sekaligus pihak yang melakukan pembayaran, sehingga tidak ada verifikasi independen sebelum uang keluar.

Usai transaksi, nota diserahkan ke Admin/Accounting untuk dicatat pada Excel. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti yang tersedia tanpa penomoran urut dokumen atau referensi transaksi yang konsisten. Setelah dicatat, dokumen diarsipkan oleh Admin/Accounting dalam satu map bersama dokumen lain tanpa pengindeksan yang jelas (campur berdasarkan jenis/periode/vendor). Keterlibatan Gudang/Receiving dalam memeriksa kuantitas/jenis barang belum terstruktur; pada beberapa kasus barang langsung ditempatkan ke rak tanpa berita acara atau *goods receipt* formal.

Alur di atas divisualisasikan pada Gambar 1 (Flowchart Proses Eksisting Pengeluaran Kas/AS-IS) dalam bentuk swim-lane yang memuat empat fungsi: Bagian Pemakai, Kasir, Admin/Accounting, dan Gudang. Panah menunjukkan urutan aktivitas dari permintaan kebutuhan, pembelian, pembayaran, penyerahan bukti, pencatatan, hingga pengarsipan. Dari gambar terlihat jelas titik-titik rawan pengendalian: rangkap fungsi Kasir, ketiadaan dokumen bernomor urut, absennya verifikasi penerimaan barang yang terdokumentasi, serta arsip yang tidak terstruktur.



Gambar 1. Flowchart Proses Eksisting Pengeluaran Kas (AS-IS) di Pupuk Mart

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan bertahap:

1. Pemetaan proses (flowchart) untuk mengidentifikasi urutan aktivitas dan titik kendali pada siklus pengeluaran kas eksisting.
2. RACI matrix untuk memetakan pemisahan fungsi authorization–custody–recording dan menemukan potensi rangkap tugas.
3. Matriks risiko–pengendalian untuk menilai risiko (salah bayar, duplikasi, fraud kas kecil, keterlambatan pencatatan, ketiadaan rekonsiliasi) beserta usulan kontrol minimum.
4. Penyusunan rancangan TO-BE yang mengintegrasikan three-way match (PR/PO–GR/BAST–Invoice), sistem imprest untuk kas kecil, penomoran urut dokumen, limit otorisasi berjenjang, cap “LUNAS”, rekonsiliasi bank bulanan, dan mekanisme maker–checker.

3.5 Keabsahan (Validitas)

Keandalan temuan dijaga melalui triangulasi sumber (pemilik, kasir, admin) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumen). Ringkasan temuan dan bagan alir diverifikasi kembali lewat member check kepada responden utama untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi faktual.

3.6 Etika Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan lisan dari Pemilik. Identitas vendor dan nilai transaksi dianonimkan. Dokumen yang difoto/disalin digunakan hanya untuk kebutuhan akademik dan disimpan secara aman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Proses Eksisting (AS-IS)

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem pengeluaran kas di *Pupuk Mart* masih dijalankan secara manual dan belum memiliki dokumentasi yang memadai. Proses diawali ketika bagian pemakai menginformasikan kebutuhan barang secara lisan kepada kasir. Setelah menerima permintaan tersebut, kasir membeli langsung ke pemasok tanpa menggunakan formulir permintaan pembelian (*purchase requisition*) atau *purchase order* (PO).

Setelah barang diterima, kasir membayar secara tunai dan menerima nota pembelian dari pemasok. Nota tersebut diserahkan kepada admin/accounting untuk dicatat menggunakan spreadsheet Excel. Pencatatan dilakukan tanpa nomor urut dokumen, tanpa klasifikasi transaksi, dan tanpa tanda otorisasi dari pihak lain. Setelah dicatat, dokumen diarsipkan secara campur, tanpa pengelompokan berdasarkan tanggal, jenis transaksi, atau pemasok. Proses aktual ini divisualisasikan dalam Gambar 1.

Analisis terhadap flowchart di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar aktivitas terkonsentrasi pada kasir, yang merangkap sebagai pelaksana pembelian, penerima barang, sekaligus pembayar. Pemisahan fungsi (segregation of duties) antara otorisasi, pelaksanaan, dan pencatatan belum berjalan. Dokumen transaksi tidak bernomor urut, tidak ada tanda “LUNAS”, serta belum diterapkan mekanisme verifikasi atau *three-way match*. Kondisi ini menandakan lemahnya sistem pengendalian internal dan berpotensi menimbulkan salah bayar, duplikasi, atau bahkan manipulasi data.

4.2 Evaluasi Berdasarkan Komponen SPI (COSO Framework)

Tabel 2 berikut menunjukkan hasil penilaian terhadap sistem eksisting berdasarkan lima komponen utama SPI menurut kerangka COSO (2013).

Tabel 2. Evaluasi Kesesuaian Sistem Pengeluaran Kas terhadap Komponen SPI

Komponen SPI	Kondisi Eksisting di Pupuk Mart	Evaluasi Kesesuaian
Lingkungan Pengendalian	Struktur organisasi sederhana; tidak ada uraian tugas tertulis.	Belum sesuai – pembagian fungsi tidak jelas dan belum terdokumentasi.
Penilaian Risiko	Risiko belum diidentifikasi secara sistematis. Tidak ada penilaian atas potensi kesalahan pembayaran atau penyalahgunaan kas kecil.	Belum sesuai – risiko tidak dianalisis maupun dikendalikan secara formal.
Aktivitas Pengendalian	Tidak ada pembatasan otorisasi, dokumen tidak bernomor urut, kas kecil tidak menggunakan sistem imprest.	Belum sesuai – aktivitas pengendalian lemah dan tidak terdokumentasi.
Informasi & Komunikasi	Pencatatan hanya menggunakan Excel tanpa log atau pengendalian akses; informasi disampaikan secara lisan.	Kurang sesuai – media komunikasi tidak terdokumentasi dan mudah berubah.
Pemantauan	Tidak ada audit internal atau rekonsiliasi periodik; pemilik hanya meninjau kas bila terjadi selisih.	Belum sesuai – monitoring bersifat reaktif, bukan preventif.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa seluruh komponen SPI masih belum diterapkan secara konsisten. Lemahnya pemisahan fungsi dan kurangnya dokumentasi membuat sistem pengeluaran kas tidak mampu memberikan jejak audit yang memadai.

4.3 Matriks Risiko dan Pengendalian yang Direkomendasikan

Sebagai hasil analisis risiko dan observasi prosedur di lapangan, disusun Matriks Risiko–Pengendalian berikut untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan langkah mitigasi yang dapat diterapkan.

Tabel 3. Matriks Risiko–Pengendalian Sistem Pengeluaran Kas

Risiko Utama	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang Direkomendasikan
Salah bayar atau duplikasi pembayaran	Tidak ada <i>three-way match</i> ; pembelian dilakukan langsung oleh kasir	Kerugian kas dan kesalahan pencatatan	Terapkan prosedur verifikasi PR–PO–BAST/GR–Invoice sebelum pembayaran
Fraud kas kecil	Sistem non- <i>imprest</i> ; bukti tidak lengkap	Kebocoran kas dan ketidaktepatan saldo	Terapkan sistem kas kecil <i>imprest</i> dan bukti kas keluar (BKK) bernomor urut
Nota fiktif atau transaksi tidak sah berjenjang	Tidak ada otorisasi	Pembengkakan beban dan penyalahgunaan dana	Tetapkan batas otorisasi per nilai dan sistem <i>maker–checker</i>
Pencatatan terlambat	Dokumen tidak berurutan dan arsip campur	Laporan keuangan tidak akurat	Terapkan jadwal <i>cut-off</i> periodik dan indeks arsip berdasarkan vendor/periode
Rekonsiliasi tidak dilakukan	SDM terbatas dan proses manual	Salah saji saldo kas/bank	Lakukan rekonsiliasi bank bulanan oleh pihak independen (bukan kasir)

Tabel 3. merangkum lima sumber risiko utama pada siklus pengeluaran kas beserta penyebab, dampak, dan kontrol yang disarankan. Intinya: kelemahan muncul karena alur yang serba lisan, dokumen tidak bernomorurut, dan fungsi yang merangkap—sehingga bukti tidak diverifikasi, pencatatan terlambat, dan saldo tidak direkonsiliasi. Kontrol yang diusulkan saling terkait: *three-way match* (3WM), sistem kas kecil imprest, limit otorisasi dengan maker–checker, *cut-off* & pengarsipan berindeks, serta rekonsiliasi bank rutin.

1. Salah bayar/duplikasi pembayaran. Tanpa 3WM, kasir bisa langsung membeli dan membayar berdasarkan nota pemasok, sehingga rawan salah harga/kuantitas atau bahkan pembayaran ganda. Dampaknya adalah kerugian kas dan salah saji pencatatan. Solusinya adalah verifikasi 3WM sebelum bayar: (a) ada PR/PO yang disetujui, (b) ada BAST/GR dari gudang yang menyatakan barang diterima sesuai, dan (c) invoice cocok nilai/kuantitas/harga dengan PO & GR. Bila tidak cocok, kembalikan untuk klarifikasi/retur. Setelah 3WM lolos, barulah siapkan BKK dan lakukan pembayaran.
2. Fraud kas kecil. Sistem non-imprest dan bukti yang tidak lengkap membuat saldo kas kecil “mengambang” dan sulit diaudit; ruang abu-abu ini sering jadi pintu kebocoran. Terapkan imprest: tetapkan saldo tetap (mis. Rp1.500.000), setiap pengisian kembali = total bukti sah sejak top-up terakhir. Gunakan BKK bernomorurut + lampiran bukti (struk, tiket, dll.), tulis kode akun/uraian, dan minta paraf penerima. Lakukan hitung fisik kas kecil mendadak (spot check) dan pisahkan peran: kasir memegang kas, admin memeriksa bukti & menyiapkan reimburse, atasan menyetujui.
3. Nota fiktif/transaksi tidak sah. Ketidadaan otorisasi berjenjang membuat pembayaran bisa dilakukan meskipun transaksi tidak sah atau melebihi kebutuhan. Terapkan limit nilai (mis.: ≤Rp500 ribu disetujui Admin, Rp500 ribu–Rp3 juta Pemilik/Supervisor, >Rp3 juta Pemilik + satu otorisator), semuanya tertulis di SOP. Gunakan mekanisme maker–checker: satu pihak menyiapkan dokumen/pembayaran (maker), pihak berbeda memeriksa & menyetujui (checker). Simpan log persetujuan (tanda tangan/cap/email) agar jejak audit jelas.
4. Pencatatan terlambat. Dokumen yang tidak berurutan dan arsip yang “campur aduk” menyebabkan keterlambatan posting dan laporan tidak akurat. Tetapkan jadwal cut-off (mis. harian untuk kas kecil, mingguan untuk utang pemasok) dan indeks arsip berbasis Vendor/Periode/No. Dokumen. Gunakan penomoran otomatis untuk PR, PO, GR/BAST, Invoice, dan BKK; buat register utang dan daftar BKK di spreadsheet terproteksi (kolom wajib: tanggal, no. dok, vendor, uraian, akun, nilai, status 3WM, status bayar). Kebiasaan rapi ini mempercepat penelusuran dan menurunkan error.
5. Rekonsiliasi tidak dilakukan. SDM terbatas dan proses manual sering membuat rekonsiliasi diabaikan, padahal ini kontrol detektif yang krusial. Lakukan rekonsiliasi bank bulanan oleh pihak independen dari kasir: cocokkan mutasi bank dengan buku kas/bank; identifikasi selisih (cek dalam perjalanan, biaya administrasi, salah posting), dan tutup selisih dengan jurnal koreksi setelah disetujui. Sekaligus lakukan rekap usia utang (aging) untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. Untuk kas kecil, lakukan rekonsiliasi imprest setiap kali top-up: saldo fisik + bukti = saldo buku.

Prioritas implementasi (quick wins). Mulai dari yang paling mudah namun berdampak besar: (i) penomoranurut + cap “LUNAS” di semua dokumen pengeluaran, (ii) 3WM untuk pemasok utama, (iii) imprest kas kecil dengan BKK bernomor, (iv) rekonsiliasi bank bulanan oleh admin, dan (v) limit otorisasi + maker–checker. Setelah itu, perkuat arsip berindeks dan cut-off rutin. Ukur kemajuan dengan indikator sederhana: persentase transaksi yang lolos 3WM, selisih rekonsiliasi nol, dan ketepatan waktu penutupan periode.

Dengan menjalankan kontrol-kontrol di atas secara konsisten, siklus pengeluaran kas menjadi lebih tertib, terdokumentasi, dan dapat diaudit, sehingga risiko salah bayar, kebocoran kas, maupun salah saji saldo dapat ditekan hingga level yang dapat diterima untuk skala UMKM.

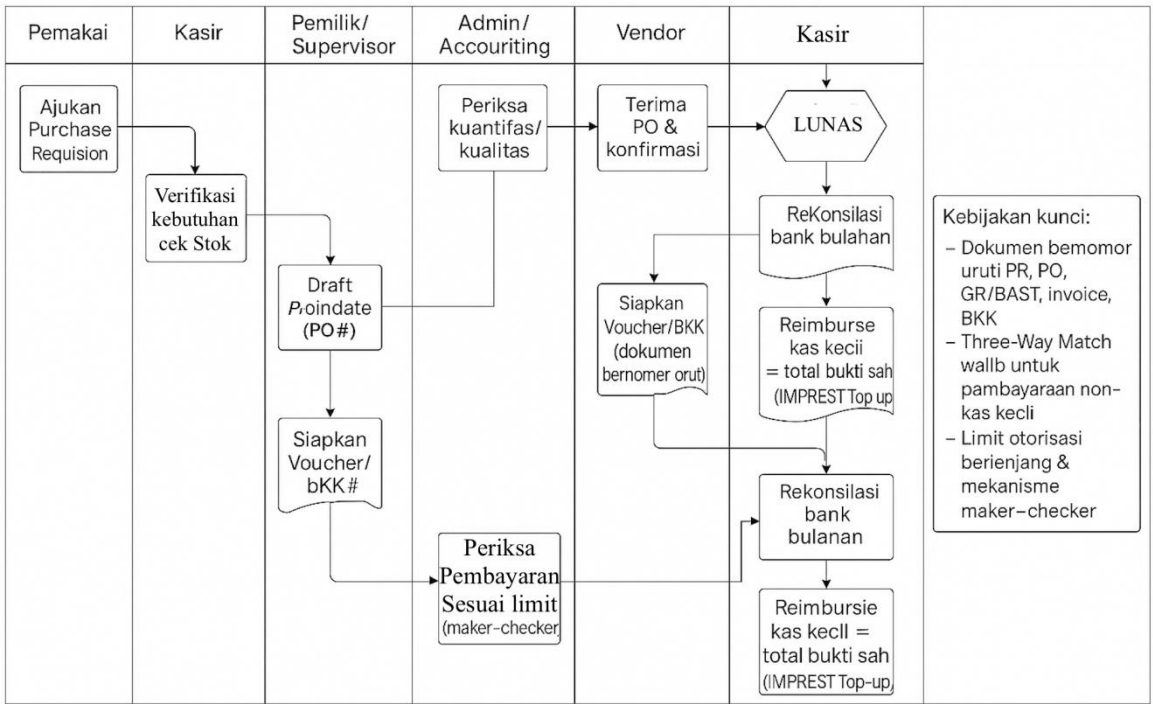
4.4 Usulan Perbaikan Sistem (TO-BE System)

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, rancangan sistem usulan (TO-BE) disusun untuk memperkuat pengendalian internal tanpa menambah beban operasional berlebihan bagi UMKM. Perubahan utama mencakup penggunaan dokumen bernomorurut, sistem kas kecil imprest, mekanisme otorisasi berjenjang, serta prosedur *three-way match* untuk pembayaran non-tunai.

Flow usulan dimulai ketika Pemakai mengajukan *Purchase Requisition* (PR#) kepada Kasir/Pembelian yang kemudian memverifikasi kebutuhan dan ketersediaan stok. Berdasarkan PR yang sah, Pembelian menyusun *Purchase Order* (PO#) dan meminta otorisasi berjenjang kepada Pemilik/Supervisor sesuai limit. Vendor menerima PO dan mengirim barang serta invoice. Saat barang tiba, Gudang/Receiving memeriksa kuantitas/kualitas dan menerbitkan Goods Receipt/BAST#. Setelah itu Admin/Accounting mengumpulkan ketiga dokumen—PO, GR/BAST, dan Invoice—untuk melakukan *three-way match*. Jika sudah cocok,

Admin menyiapkan Voucher/Bukti Kas Keluar (BKK#) bernomor urut sebagai *maker*; Pemilik/Supervisor bertindak sebagai *checker* untuk menyetujui pembayaran.

Tahap akhir dilakukan oleh Kasir: pembayaran via kas kecil (IMPREST) bila nilai \leq batas kas kecil atau transfer bank bila di atas batas. Invoice diberi cap “LUNAS”, seluruh dokumen diarsipkan berindeks (Vendor/Periode/No. Dok), dan Admin melakukan rekonsiliasi bank bulanan serta top-up kas kecil sebesar total bukti sah agar saldo kembali ke nilai imprest. Dengan kebijakan kunci—dokumen bernomor urut (PR, PO, GR/BAST, Invoice, BKK), three-way match wajib, limit otorisasi + maker-checker, serta rekonsiliasi periodik—alur TO-BE ini menyediakan jejak audit yang kuat, memisahkan fungsi, dan menekan risiko salah bayar maupun kebocoran kas.



Gambar 2. Flowchart Sistem Pengeluaran Kas Usulan (TO-BE)

4.5 RACI (Pemisahan Tugas) Usulan Minimum

Tabel 3. Matriks RACI Sistem Usulan

Aktivitas	Pemakai Gudang	Pembelian	Admin/Accounting	Kasir	Pemilik
Ajukan PR	R	C	C	I	I
Terbitkan PO	C	C	R/A	I	I
Terima & periksa barang (GR/BAST)	I	R/A	C	I	I
Verifikasi 3WM (PO-GR-Invoice)	I	C	C	R	A (di atas limit)
Siapkan BKK/Voucher	I	I	I	R	A (di atas limit)
Pembayaran (kas kecil/transfer)	I	I	I	C	A (di atas limit)
Rekonsiliasi bank/kas kecil	I	I	I	R	C

Keterangan: R = Responsible, A = Approver, C = Consulted, I = Informed.

Penerapan RACI di atas memastikan tidak ada individu yang memiliki kendali penuh atas keseluruhan siklus transaksi, sehingga fungsi otorisasi, penyimpanan kas, dan pencatatan terpisah dengan jelas.

4.6 Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengeluaran kas *Pupuk Mart* belum memenuhi standar SPI yang efektif. Lemahnya pemisahan fungsi, ketiadaan dokumen bernomorurut, dan absennya rekonsiliasi menyebabkan sistem rawan salah saji dan kecurangan. Melalui penerapan rancangan *TO-BE* yang mengadopsi prinsip *three-way match*, *imprest system*, dan *maker-checker*, risiko tersebut dapat diminimalkan secara signifikan.

Dari sisi efisiensi, sistem usulan tetap mempertahankan fleksibilitas operasional yang sesuai dengan skala UMKM, karena prosedur baru menggunakan dokumen sederhana dan alat bantu spreadsheet, bukan aplikasi kompleks. Penerapan batas otorisasi juga memberikan keseimbangan antara kecepatan keputusan dan kontrol atas transaksi bernilai besar.

Selain itu, rekonsiliasi bank bulanan dan pengisian kas kecil berbasis *imprest* diharapkan dapat meningkatkan keakuratan saldo kas, serta mempermudah proses audit internal maupun eksternal. Penerapan kebijakan penomoranurut dan cap “LUNAS” akan memperkuat jejak audit, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri secara transparan.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan SPI yang sederhana namun konsisten sangat relevan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi sistem pengeluaran kas pada skala usaha mikro dan menengah seperti *Pupuk Mart*.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas pada UMKM “Pupuk Mart” belum selaras dengan prinsip SPI. Temuan utama pada kondisi *AS-IS* meliputi rangkap fungsi kasir (pembelian sekaligus pembayaran), ketiadaan dokumen bernomorurut dan cap “LUNAS”, tidak diterapkannya *three-way match* (PO–GR/BAST–Invoice), serta rekonsiliasi bank yang tidak rutin. Kelemahan ini membuka peluang salah bayar/duplikasi, ketidakakuratan saldo kas/bank, keterlambatan pencatatan, dan berkurangnya daya telusur audit.

Rancangan *TO-BE* yang diusulkan—*imprest* untuk kas kecil, *three-way match* wajib, limit otorisasi berjenjang dengan mekanisme *maker-checker*, penomoranurut untuk seluruh dokumen (PR, PO, GR/BAST, Invoice, BKK), arsip berindeks, serta rekonsiliasi bank bulanan—memberi kerangka kontrol yang sederhana namun efektif untuk skala UMKM. Implementasi bertahap dimulai dari penomoran dan 3WM pada pemasok utama, diikuti penguatan kas kecil dan rekonsiliasi, diperkirakan meningkatkan keandalan pelaporan, memperkuat jejak audit, sekaligus menekan risiko kecurangan tanpa mengorbankan kelincahan operasional.

REFERENSI

- [1] ACFE. (2022). *Report to the Nations: 2022 global study on occupational fraud and abuse*. Association of Certified Fraud Examiners.
- [2] Aini, N., Mulyono, A., & Rahmawati, D. (2024). Penerapan sistem *imprest* pada kas kecil UMKM untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 45–56.
- [3] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
- [4] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- [5] Doyle, J. T., Ge, W., & McVay, S. (2007). Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1–2), 193–223. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.10.003>
- [6] Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. (2018). *Accounting information systems* (11th ed.). Wiley.
- [7] Hall, J. A. (2016). *Accounting information systems* (9th ed.). Cengage Learning.
- [8] IFAC. (2016). *Guide to using International Standards on Auditing in the audits of small- and medium-sized entities* (3rd ed.). International Federation of Accountants.
- [9] The Institute of Internal Auditors. (2017). *International professional practices framework (IPPF)*. The IIA.
- [10] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate accounting* (17th ed.). Wiley.
- [11] Krismiaji. (2015). *Sistem informasi akuntansi* (4th ed.). Andi.
- [12] Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.

- [13] Messier, W. F., Jr., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2017). *Auditing & assurance services: A systematic approach* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- [14] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- [15] Moeller, R. R. (2016). *Brink's modern internal auditing* (8th ed.). Wiley.
- [16] Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (5th ed.). Salemba Empat.
- [17] Navalina, R. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kas pada koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi*, 5(2), 88–95.
- [18] OECD. (2017). *Enhancing the contributions of SMEs in a global and digitalised economy*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- [19] Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson.
- [20] Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- [21] Syafira, R., Rizqi, A., & Rumiasih, N. (2024). Evaluasi penerapan three-way match pada siklus pembelian CV Migaspro. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 33–45.
- [22] Syah, R. (2024). Analisis sistem pengeluaran kas pada UMKM Mealsmound.Id. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Mikro*, 12(2), 77–86.
- [23] World Bank. (2020). *Small and medium enterprises (SMEs) finance*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance>